

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Solichin Wahab. (2014). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Modal-Modal Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- Agus Subianto. (2020). *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant PT Menuju Insan Cemerlang.
- Agustinus Subarsono. (2020). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin Tahir, M. S. (2020). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Alfabeta.
- Deddy Mulyadi. (2018). *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik: Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Edi Soeharto. (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Effendy. (2003). *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Gary Goopaster. (1993). *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. ELIPS Project.
- Harahap, N. (2020). *Buku Metodologi Penelitian Kualitatif*. Wal Ashri Publishing.
- Leo Agustino, P. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta.
- Nurmaningsih. (2012). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Purwanto, E. A., & Dyah Ratih Sulistiyastuti. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Rahmadi, T. (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Rajawali Pers.
- Sahya Anggara, M. S. (2018). *Kebijakan Publik Pengantar Prof. Dr. H. Endang Soetarti, A.D., M.Si (Pertama)*. CV. PUSTAKA SETIA.
- Siti Marwiyah, M. S. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik Administrasi. Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*. CV Mitra Ilmu.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Widjaya, G. (2001). *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Raja Grafindo Persada.

Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing.

JURNAL/SKRIPSI

Anzila Aftitah. (2022). *Peran Perangkat Adat Gampong Sebagai Mediator Dalam Mengatasi Perselisihan Suami Istri Di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya* (Issue 8.5.2017). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Datumula, S. (2023). Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 14550–14564. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.2090>

Deddy Mulyadi. (2018). *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik: Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Alfabeta.

Husin, T. (2015). Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(67), 511–532. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6085>

Junaidi, J., Muhaddis, M., Armanda, D., & Gunawan, T. (2024). Implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dalam Menyelesaikan Sengketa di Tingkat Gampong. *Jurnal Mimbar Administrasi*, 21(2), 191–205.

Kadaryanto, B., & Harahap, I. (2024). Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Masalah Masyarakat Oleh Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial ...*, 01(03), 282–293. <http://jurnal.ittc.web.id/index.php/jiksp/article/view/545%0Ahttp://jurnal.ittc.web.id/index.php/jiksp/article/download/545/483>

Rivandi, R. (2020). *Konsep mediasi dalam penyelesaian tindak pidana ringan di gampong mesjid andeue kecamatan mila kabupaten pidie*.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Provinsi Aceh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

WEB

<https://aspost.id/jadi-pelopor-mediasi-desa-geuchik-hagu-selatan-terpilih-bersama-tiga-kades-se-indonesia/> diakses pada tanggal 1 Oktober 2024